

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar. 2015. Tanah Datar dalam Angka 2015. BPS Tanah Datar
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar. 2015. Statistik Daerah Kabupaten Tanah Datar 2015. BPS Tanah Datar
- [DEPKEU RI] Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2007. Buku Panduan Penerbitan Obligasi Daerah. [DEPKEU RI]
- Habibillah, Muhammad. 2011. Analisis Obligasi Daerah (Municipal Bond) Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah dan Strategi dalam Menerbitkannya (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Timur). [Skripsi]. Universitas Brawijaya
- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat
- Husein, Amir Maruf. 2009. Analisis Kemampuan Prov. NTB dalam Menerbitkan Obligasi Syariah Daerah untuk Pembiayaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten Sumbawa. [Tesis]. Universitas Mataram.
- Indriana, Dora, dan Malik Cahyadin. 2005. Kemungkinan Penerapan Obligasi Daerah : Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Simposium Riset Ekonomi II. Surabaya, 23-24 November 2005. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
- Mulyati, Purnama. 2011. Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Padang Dalam Penerbitan Obligasi Daerah. [Skripsi]. Universitas Andalas
- Okta, Dewi, dan David Kaluge. 2011. Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah. *Journal of Indonesian Applied Economics*. Vol. 5. 157-171
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.07/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.07/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.07/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. 2010. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 - 2015

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. 2013. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. 2011. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2010 *Audited*

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. 2012. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2011 *Audited*

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. 2013. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2012 *Audited*

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. 2014. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2013 *Audited*

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. 2015. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2014 *Audited*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.07/2010 Tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2011 Tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.07/2012 Tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.07/2013 Tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/PMK.07/2014 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Purwoko. 2005. Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Edisi Khusus

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah

S. Purnomo, Budi. 2006. Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah di Indonesia. Prosiding Kopertis Wilayah IV. Vol 2. April 2006

S. Purnomo, Budi. 2010. Obligasi Daerah. Jakarta : Alfabeta

Solihin, Dadang, dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama

Walingkas, Kenny. 2015. Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Di Kota Bitung. Jurnal Manajemen dan bisnis. IPI. Vol 2. No1

Yusril, M. 2009. Obligasi Daerah Alternatif Modal Pembangunan. Jurnal Pascasarjana Universitas Yarsi

